

**PERAN MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI BERBASIS
KAMPUNG TANGGUH SEBAGAI UPAYA MENEKAN ANGKA COVID-19 DI RT 04
RW 14 KELURAHAN KALIRUNGKUT KOTA SURABAYA**

Moch. Ali Mashuri¹, Shinta Devi Apriliana², Vina Nahdiyah³

¹ Faculty of Social Science and Political Science, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Jl. Rungkut Madya, Surabaya, Indonesia

² Faculty of Social Science and Political Science, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Jl. Rungkut Madya, Surabaya, Indonesia

³ Faculty of Social Science and Political Science, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Jl. Rungkut Madya, Surabaya, Indonesia

¹e-mail: alimashuri.adne@upnjatim.ac.id

²e-mail : shintashoot11@gmail.com

³e-mail: vinanahdiyah99@gmail.com

Abstrak

Dalam pencegahan penyebaran covid-19 sangat dibutuhkan peran serta antara Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat . yang mana kolaborasi dari ketiga *stakeholders* tersebut termasuk kedalam praktek paradigma *good governance*. Kerjasama dari ketiga pilar tersebut sangat penting adanya sebagai bentuk upaya dalam pencegahan penyebaran covid-19. Salah satu peran yang paling penting di dalam penerapan *good governance* ialah masyarakat, yang mana masyarakat punya kewajiban untuk memantau bagaimana jalannya *good governance* terutama di tengah masa pandemi covid-19 ini peran masyarakat dibutuhkan dalam mendukung pengembangan ekonomi berbasis kampung tangguh sebagai upaya menekan angka covid-19 di RT 04 RW 14 Kelurahan Kalirungkut Kota Surabaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran kampung tangguh sebagai upaya menekan angka covid-19 di RT 04 RW 14 Kelurahan Kalirungkut Kota Surabaya. Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik penentuan informan adalah dengan cara *purposive sampling* dengan teknik pengumpulan data informasi berupa data primer dan data sekunder. Yang mana data primer atau langsung didapatkan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder didapatkan dari berbagai literatur baik dari buku, jurnal, catatan, kata-kata, gambar maupun tulisan pada saat melakukan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat dalam pengembangan ekonomi di tengah masa pendemi covid-19 melalui program kampung tangguh dilaksanakan dengan berbagai peran mulai dari langkah kecil sebagai wujud kepedulian antar sesama hingga berbagi bentuk program atau bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak covid-19 melalui kolaborasi yang transparan agar tujuan kampung tangguh dapat diwujudkan yakni sebagai upaya menekan angka covid-19 di RT 04 RW 14 Kelurahan Kalirungkut Kota Surabaya.

Keywords: *Good Governance, Pembangunan Ekonomi, Kampung Tangguh*

1. PENDAHULUAN

Good Governance atau pemerintahan yang baik merupakan salah satu paradigma baru dalam pelayanan publik. Paradigma *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan melibatkan kolaborasi antara Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat. Dengan adanya kolaborasi antara Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat diharapkan dapat menangani permasalahan yang terjadi secara dinamis sehingga prinsi-prinsip *good governance* dapat diwujudkan. Sejalan dengan penjelasan di atas, Wasistiono (2003: 28) dikutip dari (Muis, 2016) mengemukakan bahwa tuntutan adanya *good governance* ini timbul karena adanya penyimpangan dalam penyelenggaraan demokratisasi sehingga mendorong kesadaran warga negara untuk menciptakan sistem atau paradigma baru untuk mengawasi jalannya pemerintahan agar tidak melenceng dari tujuan semula. Sehingga lahirlah paradigma *good governance* yang diharapkan dapat mensinergikan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik serta tidak keluar jalur dalam konteks implementasinya. Dalam implementasinya *good governance* berpedoman berdasarkan prinsip-prinsipnya oleh karena itu dalam mewujudkan *good governance* kolaborasi atau kerjasama antar Stakeholders sangat dibutuhkan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat (Hanafi & Tunggadewi, 2019) yang menyatakan bahwa *Good governance* adalah sebuah sistem yang dalam menjalankan pemerintahan berdasar dari pola hubungan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha atau swasta dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintah dengan didukung oleh prinsip-prinsip dasar seperti kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, keadilan, profesionalisme, dan demokratis seperti tuntutan pemerintahan yang bersih atau biasa disebut *clean government* yang diprakarsai oleh UNDP, *World Bank*, *United Nation*, dan beberapa lembaga internasional lainnya. Asas umum *good governance* telah diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Di dalam masa pandemi *diases* covid-19 ini diharapkan peran *good*

governance antara ketiga pilar penting dalam perwujudannya seperti Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat diharapkan dapat berjalan secara bersinergi dan saling mendukung agar kebijakan pemerintah pusat terkait dengan pencegahan penyebaran covid-19 dapat dijalankan dengan maksimal oleh seluruh pemerintah daerah dan jajarannya. Sehingga laju penyebaran covid-19 dapat diminimalisir, tujuan diterapkannya *good governance* ialah agar jalannya pemerintahan yang dilaksanakan dapat berjalan baik sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik. Menurut (Buchloz, 1978) Tata kelola yang baik di pemerintahan pada prinsipnya bertujuan untuk terbentuknya keterbukaan informasi, perlakuan adil dalam melaksanakan kewajiban serta menerima hak terhadap semua pegawai, terdapatnya pertanggungjawaban pimpinan, serta terdapatnya partisipasi dari seluruh pegawai dalam meningkatkan kinerja yang lebih baik (Nurwahida, 2012). Sehingga diterapkannya peran para *stakeholders* dapat dijadikan acuan dalam melihat keberhasilan dari penerapan paradigma *good governance*. Hal tersebut sejalan dengan penjelasan (Ilham Arisaputra, 2013) Kasman Abdullah mengemukakan bahwa *good governance* sebagai suatu terminologi yang populer sejak awal tahun sembilan puluhan, seolah-olah formula yang baru diketemukan untuk terapi mekanisme pemerintahan suatu negara agar berjalan secara demokratis.

Meurut (Nasution, 2018) *Good Governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaktif yang konstruktif diantara domain negara, sektor swasta dan masyarakat (Sedarmayanti, 2010 :36). Sedangkan menurut (Hakim, 2016) Dalam pandangan masyarakat *good governance* diharapkan bisa melahirkan sinergi antara pemerintah (*government*), swasta (*private sector*) dan masyarakat (*civil society*). Dari penjelasan diatas maka penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau *good governace* peranan dari ketiga *stakeholders* tersebut tidak dapat dilepaskan sebab ketiganya saling berkaitan dan memiliki peranan yang

sangat mendukung terwujudnya *good governance*. Menurut (Hakim, 2016) Adapun pemahaman paradigma *good governance* dijabarkan oleh Kementerian PAN dan RB sebagai berikut:

1. Mendudukan peran pemerintah lebih sebagai katalisator, regulator, fasilitator, pengarah, pembina, dan pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah.
 2. Perlindungan HAM dan pelaksanaan demokrasi.
 3. Pemerataan pendapatan dan penanggulangan kemiskinan.
 4. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjamin kepastian hukum, keterbukaan, profesional, dan akuntabilitas.
- Sehingga sistem pemerintahan modern yang efektif serta professional berdasarkan paradigma *good governance* dapat diwujudkan melalui penerapannya dengan mengutamakan asas- asas *good governance* meliputi akuntabilitas, transparansi, partisipasi, serta keadilan.

Dalam melakukan pencegahan dan penyebaran Covid-19 sangatlah dibutuhkan peran-peran dari Pemerintah, Swasta, maupun Masyarakat. yang diharapkan dengan Kerjasama antara para *stakeholders* tersebut dapat menciptakan kekuatan yang Tangguh guna memerangi virus yang telah menjadi masalah global yakni virus covid-19. Penyebaran virus covid-19 sangatlah cepat dan efek yang ditimbulkan dari penyebaran virus ini sangat berbahaya dampak yang paling buruk adalah kematian. Di Indonesia virus covid-19 tercatat terjadi pada bulan Maret 2020 yang dijadikan awal dari penyebaran virus covid-19. Maka dengan penyebaran yang cepat pemerintah pusat membuat suatu kebijakan terkait dengan protokol Kesehatan. Di dalam protokol kesehatan diharapkan masyarakat senantiasa dapat beradaptasi dengan kebiasaan yang baru menuju masyarakat yang produktif dan aman terhadap covid-19. Yang mana masyarakat diajak untuk bisa menjaga pola hidup yang sehat mulai dari sering mencuci tangan, wajib memakai masker jika keluar rumah, sebagai bentuk dilakukannya mitigasi dampak pandemi covid-19 khususnya di tempat dan fasilitas umum. Hal tersebut telah diatur sedemikian rupa di dalam

(Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 covid-19*). Dari kebijakan tersebut pemerintah pusat berharap agar pemerintah daerah dapat menjadi agen utama di daerah dalam memerangi virus covid-19. Berbagai kebijakan dari pemerintah pusat diadopsi oleh setiap pemerintahan daerah untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan konteks kebijakan dari pemerintah pusat guna melakukan Gerakan dalam pencegahan penyebaran covid-19 di daerahnya masing-masing. Di daerah pemerintah juga berharap agar virus covid-19 tidak banyak menginfeksi warga masyarakatnya maka diperlukan suatu Kerjasama antara Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat dalam pencegahan penyebaran virus covid-19. Berdasarkan (infocovid19.jatimprov.go.id, 2020) Peta penyebaran covid-19 di Jawa Timur per tanggal 15 Juli 2020 tercatat sebanyak 17370 yang terkonfirmasi terinfeksi covid-19 dengan data positif sebanyak 17370 orang, PDP (Pasien Dalam Pengawasan) sebanyak 13007 orang, dan ODP (Orang Dalam Pemantauan) sebanyak 31384 orang. Dari data tersebut menunjukkan bahwa virus covid-19 sangatlah cepat penularannya sehinggaantisipasi awal sangat dibutuhkan guna memerangi virus covid-19 ini di Jawa Timur terutama di Kota Surabaya.

Berdasarkan peta penyebaran covid-19 di Jawa Timur, salah satu kota yang terdampak bahaya covid-19 adalah kota Surabaya yang mana di kota Surabaya penyebaran covid-19 begitu cepat berikut data covid-19 di kota Surabaya per tanggal 15 Juli 2020 berdasarkan (www.Surabaya.tribunnews.com, 2020) tercatat sebanyak 3.705 orang dinyatakan sembuh, 638 orang dinyatakan meninggal, 5.966 orang dinyatakan sebagai PDP (Pasien Dalam Pengawasan) dan 4.700 dinyatakan sebagai ODP (Orang Dalam Pemantauan). Dari hasil data pasien tersebut memang penularan virus covid-19 begitu cepat menyebarkan terutama di kota

Surabaya. Oleh karena itu walikota Surabaya berusaha menekan angka covid-19 dengan melakukan berbagai upaya atau Tindakan tegas guna memutus mata rantai virus covid-19 dengan menggelar operasi patuh masker dan Rapid test secara berkala. Berdasarkan peta penyebaran covid-19 di kota Surabaya membawa dampak penyebaran pula ke daerah atau wilayah sekitar secara masif, salah satu wilayah yang terindikasi kasus covid-19 adalah RT 04 RW 14 Kelurahan Kalirungkut Kota Surabaya. Secara keseluruhan jumlah warga di RW 14 per Februari 2020 tercatat jumlah warga tetap sebanyak 699 warga yang terbagi antara lain : RT 1 : 288 warga, RT 2 : 122 warga, RT 3 : 125 warga, dan RT 4 : 164 warga. Sedangkan warga musiman tercatat sebanyak 750 warga yang terbagi antara lain : RT 1 : 300 warga, RT 2 : 150 warga, RT 3 : 150 warga, dan RT 4 : 150 warga. Berdasarkan data diatas warga yang terindikasi kasus covid-19 tercatat sebanyak 15 orang dinyatakan masih melakukan perawatan intensif di Rumah Sakit, 11 orang dinyatakan meninggal dunia, dan berdasarkan hasil Rapid test 123 orang dinyatakan reaktif atau dalam masa karantina.

Dari penjelasan data diatas maka peran-peran dari Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat sangatlah dibutuhkan dalam melakukan Gerakan pencegahan penyebaran covid-19. Dengan mewabahnya virus covid-19 ini membuat berbagai perubahan di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Disamping itu wabah pandemi Covid-19 ini juga menimbulkan dampak pada bidang ekonomi yang berupa krisis yang mengguncang ekonomi dan pasar tenaga kerja yang berdampak tidak hanya pasokan (produksi barang dan jasa) tetapi juga permintaan (konsumsi dan investasi). Dampak ekonomi lah yang membuat makin tidak berdaya nya suatu negara dalam menangani pandemi ini. Berbagai kebijakan atau bahkan skenario baik dari segi ekonomi ataupun politik dikeluarkan oleh pemerintah sebagai bentuk pencegahan hal yang paling buruk dapat terjadi ke depannya. Menyadari dari hal tersebut pemerintah memberikan respon dengan mengeluarkan suatu kebijakan

untuk mengurangi penyebaran virus Covid-19 yang dilakukan oleh Gugus Tugas Percepatan Penangan Covid-19. Kebijakan jaga jarak yang diimplementasikan baik pada tingkat nasional maupun daerah bukanlah suatu kebijakan yang mulus tanpa adanya resiko. Yang mana dari kebijakan tersebut dapat memperlambat jalannya kegiatan ekonomi negara. Oleh karena itu, dalam melakukan pencegahan penyebaran covid-19 harus adanya alternative-alternative yang efektif agar apabila terjadi dampak yang terburuk masih ada alternative yang bisa diambil dan dimanfaatkan oleh Pemerintah dalam hal ini baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah harus saling berkolaborasi dalam melakukan pemantauan pencegahan penyebaran covid-19.

Menurut (Nata, Manossoh, & Mawikere, 2018) Good governance adalah, penyelenggaraan pemerintahan kesinergiaan interaksi yang konstruktif diantara domain- domain (state, private sector and society). Untuk mencapai keberhasilan dari setiap program tentunya menjadi sangat penting untuk menilai sebuah program dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Selain itu dalam penyelenggaraanya aspek *Good Governance* menjadi bagian yang cukup penting untuk menilai bagaimana sebuah program berlangsung. Sehingga berhasil atau tidaknya penerapan *good governance* dapat dilihat dari penerapan program-program yang dibuat dengan melibatkan berbagai pilar di dalam pemerintahan terutama keterlibatan dari ketiga pilar *good governance*. Dari program-program yang dibuat atau direncanakan diharapkan terdapat *feedback* antara pemerintah dan masyarakat selaku pelaksana dan pemantau program.

Pada masa pandemi covid-19 yang terjadi saat ini maka sangat dibutuhkannya suatu kebijakan atau program yang mengatur tentang pencegahan dan penyebaran virus covid-19 terutama dalam menekan angka covid-19 yang hampir setiap hari terus mengalami peningkatan kasus terutama di daerah Jawa Timur. Maka dari itu Gubernur Jawa Timur melakukan kolaborasi bersama Forkopimda yakni Polda Jatim dan Kodam

V/Brawijaya membuat suatu program yang mana program tersebut akan diterapkan pada masa pandemi sebagai upaya meminimalisir bertambahnya kasus covid-19 di Jawa Timur. Program yang dibuat ialah Program Kampung Tangguh Semeru yang pembentukannya memang diprioritaskan pada kampung atau desa yang angka penyebaran covid-19 baik pasien positif, PDP (pasien dalam pengawasan), dan ODP (orang dalam pemantauan) masih cukup tinggi. Sampai saat ini sudah ada total 1.559 Kampung Tangguh Semeru di wilayah Poldo Jatim. Dengan adanya penerapan konsep kampung Tangguh diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam mengatasi masalah Kesehatan, sosial, ekonomi dan keamanan. Kedepannya kampung tangguh yang merupakan hasil dari kolaborasi para stakeholders terutama Gubernur Jawa Timur bersama jajaran Forkopimda dapat memberikan sebuah hasil yang positif sebagai bentuk dari hasil bottom up *participation* atau partisipasi dari bawah atau masyarakat kepada pemerintah. Sehingga dari penjelasan tersebut maka peran serta masyarakat dengan adanya program kampung tangguh semeru diharapkan dapat menekan angka covid-19 di Jawa Timur. Dengan adanya kampung tangguh di tingkat RT, RW, Desa atau Kelurahan, hingga Kecamatan, serta ditambah dengan Pesantren Tangguh dan Industri Tangguh, maka hal tersebut akan menjadi kekuatan dalam menjaga ketahanan nasional.

Dengan diterapkannya kampung tangguh semeru sesuai dengan arti semeru sendiri yakni sehat, aman, tertib, dan rukun diharapkan kedepannya dapat dijalankan sesuai dengan karakter wilayah masing-masing, agar masyarakat dapat berubah menuju kehidupan yang baru dengan memerangi adanya wabah dan masyarakat juga harus mengoptimalkan perannya dengan bekerjasama untuk menekan angka covid-19 dan memutus mata rantai covid-19 di daerahnya masing-masing. Sehingga tujuan dari kampung tangguh semeru dapat diwujudkan dengan peran serta pemerintah dan masyarakat serta pihak swasta guna mewujudkan masyarakat yang sehat, aman, tertib, dan

rukun di tengah masa pandemi covid-19 saat ini. Oleh karena itu, sejalan dengan penerapan program kampung tangguh maka peranan dari para *stakeholders* dapat lebih ditingkatkan agar keadaan ekonomi masyarakat dapat berkembang ataupun stabil di tengah masa pandemi saat ini. Apapun langkah-langkah yang dilakukan diharapkan dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik terutama di dalam bidang ekonomi masyarakat yang terdampak.

Untuk mewujudkan tercapainya penerapan *good governance* dengan melibatkan peran *stakeholders* yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat harus mengedepankan komitmen kolaborasi dari ketiga pilar tersebut agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai terutama peran masyarakat sangatlah dibutuhkan dalam menjalankan program kampung tangguh sebagai upaya menekan angka covid-19. Selain itu pemerintah dan swasta pun juga harus saling mendukung masyarakat agar program ataupun kebijakan yang dibuat dapat dijalankan. Pemerintah juga harus melakukan pendekatan sosial kepada masyarakat terdampak covid-19 dengan begitu masyarakat dapat memberikan kepercayaan kepada pemerintah dalam menangani pencegahan dan penyebaran covid-19 dengan memutus mata rantai covid-19 secara masif.

Rumusan Masalah

Bagaimanakah Peran Masyarakat Terhadap Pembangunan Ekonomi Berbasis Kampung Tangguh Sebagai Upaya Menekan Angka Covid-19 Di RT 04 RW 14 Kelurahan Kalirungkut Kota Surabaya?

Tujuan Dan Manfaat

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis Peran Masyarakat Terhadap Pembangunan Ekonomi Berbasis Kampung Tangguh Sebagai Upaya Menekan Angka Covid-19 Di RW 14 RT 04 Kelurahan Kalirungkut Kota Surabaya. Manfaat dari penelitian ini secara teoritis adalah untuk menunjang pengembangan ilmu pengembangan pelaksanaan pemerintahan terkait dengan pretekt paradigma *good governance*, serta dapat

mengetahui peran masyarakat setempat terhadap program pemerintah dalam menekan angka covid-19, secara praktis dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah dalam pengambilan keputusan penerapan dan pengembangan kebijakan terkait dengan upaya pencegahan penyebaran covid-19 terutama pada bidang ekonomi di Kelurahan Kalirungkut Kota Surabaya.

2. LANDASAN TEORI

Good Governance

Good Governance atau pemerintahan yang baik merupakan salah satu paradigma yang penting dalam mewujudkan aspirasi atau keinginan masyarakat untuk mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Menurut (Uar, 2016) Konsep *good governance* untuk dilaksanakan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara dilatar belakangi oleh banyak faktor. Namun demikian salah satu faktor yang terbesar adalah ketidak berdayaan pemerintah negara-negara berkembang dalam menghadapi era globalisasi yang penuh dengan persaingan kompetensi standar tinggi. Dengan ketidakberdayaan masyarakat dalam memecahkan masalah yang terjadi maka pemerintah mengharapkan adanya peran atau kolaborasi antara swasta dan masyarakat. hal ini mencerminkan bahwa di dalam penyelenggaraan suatu negara tujuan yang harus dicapai perlu dilakukan secara bersama antara ketiga stakeholders yakni pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Menurut Sedarmayanti (2012:5) menjelaskan *good governance* adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *publik goods and service* disebut *governance* (pemerintah atau pemerintahan), sedangkan praktik terbaiknya disebut *good governance* (kepemerintahan yang baik). Sejalan dengan hal tersebut *governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Sedangkan menurut (Munaf, Febrian, & S, 2018) "*good governance*" sebagai persyaratan utama untuk setiap program bantuan mereka. Para pakar dan praktisi administrasi negara Indonesia, istilah "*good governance*" telah diterjemahkan

dalam berbagai istilah, misalnya, penyelenggaraan pemerintahan yang amanah. Dari penjelasan di atas maka *good governance* merupakan suatu proses penyelenggaraan pemerintahan negara dengan melakukan proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan amanah. Selain itu dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 101 Tahun 2000 dirumuskan pengertian *Good Governance*, yaitu : pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat menurut (Nasution, 2018). *Good governance* merupakan konsep pada otonomi daerah dalam rangka mewujudkan suatu pemerintahan yang sehat dan bersih dan juga merupakan suatu hal yang perlu diimplementasikan pada era otonomi daerah saat ini dalam rangka mewujudkan suatu pemerintahan yang baik dan bersih dengan lebih mengedepankan prinsip-prinsip *Good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan adanya tranparansi agar penyelenggaraan pemerintahan dalam era otonomi daerah dapat dilakukan secara baik dan bersih.

Governance dapat diartikan sebagai kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang dilayani dan dilindunginya, *governance* mencakup 3 domain yaitu *state* (negara/pemerintahan), *private sectors* (sektor swasta/dunia usaha), dan *society* (masyarakat), (Sedarmayanti, 2010:2) dikutip dari (Nasution, 2018). Sedangkan menurut sistem penyelenggaran pemerintahan ter-utama menyangkut aspek kelembagaan (*organization*) , ketatlaksanaan (*business process*) , dan sumber daya manusia (*civil servant*). Dari penjelasan tersebut maka dalam pelaksanaana *good governance* sangat dbutuhkan peranan *stakeholders* yang terdiri dari pemerintah, swasta, dan masyarakat. Peranan dari ketiga pilar *good governance* tersebut menjadi pedoman atau acuan dalam mewujudkan tujuan dari diterapkannya *good governance* dari kebijakan ataupun program-program yang

dibuat oleh pemerintah. Yang mana peranan dari ketiga pilar *good governance* sama-sama memberi dukungan yang positif apabila dalam implementasi kolaborasi dapat dilakukan secara maksimal dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal. Peranan pemerintah, swasta, dan masyarakat menggambarkan suatu bentuk Kerjasama yang solid guna mewujudkan tujuan yang diinginkan. Tujuan dilakukannya *good governance* ialah melakukan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan mengedepankan transparansi dalam proses penyelenggaraannya. Selain itu dalam penyelenggaraannya pun harus melibatkan peran dari *stakeholders* yakni pemerintah, swasta, dan masyarakat. ketiga pilar tersebut harus saling berkaitan dan bekerja dengan prinsip-prinsip kesetaraan tanpa ada upaya untuk mendominasi satu pihak kepada pihak yang lain. Menurut Mardiasmo (1999 : 18) dikutip dari (Cahyadi, 2017) *good governance* adalah suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik oleh pemerintahan yang baik. Dimana sektor swasta sebagai pengelola sumber daya di luar negara dan birokrasi pemerintah pun harus memberikan kontribusi dalam usaha pengelolaan sumber daya yang ada. Penerapan cita *good governance* pada akhirnya mensyaratkan keterlibatan organisasi masyarakatnya sebagai kekuatan penyeimbang negara. Dari penjelasan diatas maka dalam pelaksanaan konsep *good governance* output yang baik bisa dicapai apabila terjadi keseimbangan peran antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Menurut (Cahyadi, 2017) UNDP mengklasifikasikan karakteristik *good governance* sebagai berikut :

1. *Participation* : yakni keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. *Rule of Law* : yakni kerangka aturan hukum yang adil dan tidak pandang bulu.
3. *Transparency* : yakni pemerintah memberikan informasi dalam pemberian pelayanan publik secara terbuka kepada pihak yang membutuhkan informasi.

4. *Responsiveness* : yakni menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik demi kepentingan yang lebih luas.

5. *Consensus Orientation* : *Good governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur.

6. *Equity* : yakni adanya kesempatan yang sama bagi semua warga negara tanpa pembedaan gender dan sebagainya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri.

7. *Effectiveness and Efficiency* : yakni penyelenggaraan negara harus menghasilkan sesuai dengan apa yang dikehendaki dengan menggunakan sumberdaya secara maksimal mungkin.

8. *Accountability* : adalah sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

9. *Strategic Vision* : yakni pemimpin dan publik harus memiliki perspektif *good governance* dan pengembangan manusia yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan kebutuhan pembangunan.

Dari penjelasan diatas dapat dijelaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Sehingga dibutuhkannya bentuk partisipasi tersebut dengan menerapkan asas-asas *good governance* yang dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Menurut (Calnen, 2010) Terselenggaranya *Good Governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu di perlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat

berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. (Rosidin, 2004:184). Dari pengertian tersebut maka pelaksanaan *good governance* diarahkan pada secara efektif dan efisien dalam melakukan upaya pencapaian tujuan nasional serta ketahanan nasional.

Secara umum, reformasi birokrasi merupakan bagian dari strategi besar dalam ilmu perilaku organisasi yang dikenal dengan manajemen perubahan. Melaksanakan reformasi birokrasi sama dengan melakukan manajemen perubahan dalam birokrasi (Nugroho, 2013:15). Manajemen perubahan dalam birokrasi saat ini terus digulirkan melalui inovasi dan kreativitas pemerintah daerah ditengah tuntutan publik dan keterbatasan sumberdaya yang dimiliki. Beberapa pemerintah daerah mampu mengelola perubahan birokrasi tersebut secara optimal, sehingga menghadirkan kualitas pelayanan publik yang unggul dan tingkat kepuasan masyarakat yang semakin membaik.

Namun demikian, beberapa organisasi birokrasi di Indonesia telah "putus asa" karena tidak mengetahui bagaimana seharusnya dan sebaiknya manajemen perubahan dilaksanakan dan apa hasil yang perlu dicapai. Kondisi ini kemungkinan besar disebabkan oleh ketidakjelasan pemahaman manajemen perubahan untuk birokrasi, yang dimulai dari ketidakjelasan konsep yang diberikan oleh pemerintah pusat (Nugroho, 2013:40). Disadari bahwa saat ini upaya pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan masih sebatas pada upaya pemenuhan segala persyaratan administratif agar pemerintah daerah dikatakan sedang/sudah melakukan reformasi birokrasi. Sedarmayanti (2010:29) bahkan mengemukakan, bahwa reformasi birokrasi baru menyentuh "kulit"nya saja, seperti perubahan nomenklatur, restrukturisasi organisasi, dan pemberian remunerasi, sedangkan produktivitasnya masih tetap sama atau bahkan tidak meningkat sama sekali

dikutip dari (Rustan, Wismono, Ramdhani, & Aziza, 2014).

Perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi salah satunya dimunculkan konsep *good governance* yang merupakan pergeseran paradigma konsep *government* (pemerintah) menjadi *governance* (kepemerintahan). Secara ontologis perubahan paradigma *government* menuju *governance* berwujud pada pergeseran mindset dan orientasi birokrasi yang semula melayani kepentingan kekuasaan menjadi peningkatan kualitas pelayanan publik. Sebuah teori dalam *good governance* memperlihatkan bahwa variabel eksistensi pemerintahan dependen terhadap variabel eksistensi masyarakat. Oleh karenanya revisi kerangka berfikir birokrat yang selama ini cenderung feodal adalah dengan membangkitkan kesadaran para birokrat bahwa masyarakat adalah *tax payer* (pembayar pajak) yang menjadi sumber pendapatan negara untuk menggaji mereka. Sebagai konsekwensinya birokrat dilingkungan pemerintahan seharusnya memprioritaskan pelayanan publik bukan melanggengkan kepentingan kekuasaan suatu rezim atau memelihara budaya patronklien dalam penyelenggaraan pelayan publik (Kristian Widya Wicaksono: 2006).

Osborne dan Ted Gaebler (1996) ; Federickson (1997) kedua menjelaskan bahwa dalam masyarakat yang berubah (*changing society*) *aparatur negara harus pula merubah perilakunya kearah yang lebih kondusif seiring dengan perkembangan masyarakat tersebut. Artinya pemerintah baik secara institusional maupun aparatur secara personal diharapkan beradaptasi melalui perampingan struktur, fleksibilitas, ketanggapan serta kemampuan untuk bekerjasama dengan semua pihak.*

Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa reformasi birokrasi merupakan koreksi total terhadap sistem dan perubahannya termasuk kekuasaan yang

sedang berjalan, berdasarkan pertimbangan moral, ekonomis, politik dan doktrinal. Pemerintahan Indonesia sejak tahun 1990 kacau, mulai dari kehancuran lingkungan, krisis moneter, kebangkrutan ekonomi, inflasi hukum, rivalitas politik, dan disintegrasikan sosial budaya (Talizuduhu Ndraha:2003) dikutip dari (Namlis, 2015).

Pembangunan Ekonomi

Pada masa pandemi covid-19 yang telah menjadi wabah secara global sangatlah berpengaruh terhadap keadaan ekonomi bagi suatu negara. Dengan hal tersebut maka kondisi ekonomi suatu negara dapat dilihat dari bagaimana keadaan pertumbuhannya. Menurut (Boediono, 2009:38) yang dikutip dari (Putra & Sutrisna, 2017) Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Penekanannya pada tiga aspek yaitu proses, output per kapita, dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari dua sisi yaitu sisi output totalnya (PDB) dan sisi jumlah penduduknya. Output per kapita adalah output total dibagi jumlah penduduk. Maka dari itu pertumbuhan ekonomi yang ada pada suatu negara akan berdampak pada kebijakan ataupun program yang akan dibuat oleh pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut pada masa yang akan datang. Kebijakan atau program yang akan dibuat oleh pemerintah akan berdampak pada pembangunan daerahnya. Menurut Arsyad (1999) yang dikutip dari (Weya, T.Naukoko, & Kawung, 2015) menjelaskan bahwa permasalahan pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (endogenous development) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia. Orientasi ini mengarahkan pada pengambilan inisiatif-inisiatif yang bersal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan ekonomi. Maka dari itu kebijakan yang dibuat pemerintah di tengah masa pandemi covid-19 diharapkan dapat mengatasi masalah ekonomi

masyarakat yang terdampak covid-19 serta dapat melakukan pengembangan ekonomi menjadi lebih baik di tengah serangan wabah virus covid-19.

Partisipasi Masyarakat

Menurut Adisasmita (2006: 34) yang dikutip dari (Indarto, 2019) mengatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, yang meliputi kegiatan perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pada yang ada di masyarakat lokal. Sedangkan menurut Samah & Aref (2009, p.45) yang dikutip dari (Hermawan & Suryono, 2016) menyatakan bahwa partisipasi merupakan proses pembangunan sosial, dimana orang sebagai subjek dalam lingkungan mereka sendiri, mencari cara untuk memenuhi kebutuhan kolektif mereka dan harapan untuk mengatasi masalah umum yang mereka hadapi. Jadi partisipasi masyarakat merupakan suatu bentuk keterlibatan masyarakat di dalam lingkungan mereka guna memenuhi kebutuhan melalui pembangunan. Keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan dari program-program yang telah dibuat harus melalui beberapa tahapan-tahapan menurut (Hermawan & Suryono, 2016) Tahapan partisipasi masyarakat dibagi menjadi 4 yaitu partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengambilan manfaat.

Kemudian Huraerah (2008: 117) lebih lanjut menyatakan bahwa macam-macam partisipasi adalah: (a) partisipasi langsung dalam kegiatan fisik yang dilakukan secara bersama dan bertatap muka; (b) partisipasi dalam bentuk iuran uang atau barang dalam kegiatan partisipatori; (c) partisipasi dalam bentuk dukungan; (d) partisipasi dalam proses pengambilan keputusan; (e) partisipasi representatif, dilakukan dengan memberikan mandat dan kepercayaan kepada wakil-wakil yang duduk dalam suatu organisasi atau panitia. Sehingga di dalam suatu pembangunan peran masyarakat melalui besar kecilnya partisipasi yang diberikan akan menentukan bagaimana mewujudkan tujuan yang diinginkan. Maka dalam

menilai sejauh mana partisipasi yang diberikan perlu adanya ruang lingkup partisipasi. Menurut (Mustanir & Abadi, 2017) Lingkup partisipasi dengan bertolak pada urutan proses perencanaan pembangunan, maka secara rinci jenis partisipasi dalam pembangunan sebagai berikut :

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan
2. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan
3. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan
4. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan

Dengan adanya peran atau partisipasi masyarakat sangatlah membantu di dalam proses implementasi program-program pemerintah yang telah ditetapkan. Peran serata masyarakat akan membantu memantau jalannya kebijakan pemerintah di lingkungan masyarakat. hal tersebut sejalan dengan pendapat menurut (Dyah Putri Makhmudi, 2018) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat banyak digunakan di negara maju sebagai pendekatan yang efektif pada pelaksanaan program dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan proyek publik dan tata kelola (Enserink and Koppenjan, 2007 dalam Xie, dkk., 2017). Sehingga hal ini menunjukkan bahwa peran atau partisipasi masyarakat sangatlah penting adanya yang dijadikan sebagai suatu bentuk pendekatan yang dinilai efektif dalam proses implementasi hingga evaluasi dari jalannya kebijakan atau program-program yang telah dibuat.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan metode deskriptif, Menurut (Kuswana, 2011) penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, yang penelitiannya berusaha memahami masalah-masalah sosial berdasarkan dengan fakta yang didapatkan di lapangan. Setelah itu dilakukan suatu analisis atau telaah agar dapat memperoleh suatu gambaran atau hasil yang jelas dalam pemecahan masalah yang dihadapi. Penelitian kualitatif deskriptif ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan suatu hal seperti apa adanya

berdasarkan observasi langsung. Lokasi penelitian ini adalah di RT 04 RW 14 Kelurahan Kalirungkut Kota Surabaya.

Teknik penentuan informan adalah dengan cara purposive sampling dan ditemukan beberapa informan, antara lain: 1.) Ketua RW 14; 2.) Ketua RT 04; 3.) Warga atau Masyarakat sekitar RW 14 RT 04 . Teknik pengumpulan data informasi secara kualitatif yaitu dari data primer dan sekunder. Yang mana data primer atau langsung didapatkan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder didapatkan dari berbagai literatur baik dari buku, jurnal, catatan, kata-kata, gambar maupun tulisan pada saat melakukan penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut akan disajikan data hasil penelitian dilapangan yang dibagi menjadi beberapa bagian dan data yang diperoleh tersebut selanjutnya akan dilakukan analisis untuk mengetahui Peran Kampung Tangguh Sebagai Upaya Menekan Angka Covid-19 Di RT 04 RW 14 Kelurahan Kalirungkut Kota Surabaya. Analisis interpretasi data dilakukan dengan cara mengkorelasikan data yang telah diinterpretasi dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini.

Peran Kampung Tangguh sebagai upaya menekan angka covid-19 di RT 04 RW 14 Kelurahan Kalirungkut Kota Surabaya

Kampung Tangguh Semeru merupakan suatu program yang tengah dimasifkan oleh Gubernur Jawa Timur yang bekerjasama dengan Forkopimda Jawa Timur dan Jajarannya. Kampung Tangguh ini merupakan suatu project kolaboratif yang diadakan dengan tujuan untuk menciptakan kampung-kampung tangguh di lingkungan masyarakat terutama lingkungan masyarakat yang terkena dampak dari adanya virus covid-19 yang telah mewabah di Indonesia terutama di Provinsi Jawa Timur menurut (infocovid19.jatimprov.go.id, 2020). Dengan adanya kampung tangguh yang diharapkan dapat tumbuh dan berkembang di masa pandemi ini agar setidaknya masyarakat merasaa sedikit terlindungi dengan adanya konsep kampung tangguh.

Agar tangguh dari segala aspek kehidupan masyarakat dapat di normalkan Kembali dengan mengembangkan sikap tangguh dari slogan kampung tangguh. Hal tersebut dapat diibaratkan dengan takut jangan tetapi waspada selalu. Pada intinya penerapan kampung tangguh digalakkan oleh pemerintah diharapkan dapat menekan angka covid-19 yang setiap harinya mengalami kenaikan kasus. Berdasarkan data dari (infocovid19.jatimprov.go.id, 2020) hingga per tanggal 17/06/2020 tercatat sudah ada 1.559 kampung tangguh yang ada di Jawa Timur. Dengan berjalannya program kampung tangguh di Jawa Timur ini dapat dijadikan suatu bentuk Kerjasama, dukungan ataupun kolaborasi dengan melibatkan para stakeholders agar tatanan masyarakat di lingkungan yang terdampak covid dapat terus solid dan kuat walaupun tengah berada di masa pandemi covid-19 ini.

Penerapan Kampung Tangguh di RT 04 RW 14 Kelurahan Kalirungkut Kota Surabaya Manfaat Jenjang Karir Profesional Perawat di Rumah Sakit

Governance mencakup 3 domain yaitu *state* (negara/ pemerintahan), *private sectors* (sektor swasta/dunia usaha), dan *society* (masyarakat), (Sedarmayanti, 2010:2) dalam (Nasution, 2018). Berdasarkan hal tersebut dalam mewujudkan *good governance* melalui implementasi program pemerintah maka sangat diperlukan adanya kolaborasi antara ketiga pilar *good governance* yakni Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat.

Peran Pemerintah

Gubernur Jawa Timur selaku sebagai Pemerintah Daerah melakukan kolaborasi bersama Forkopimda yakni Polda Jatim dan Kodam V/Brawijaya membuat suatu program yang mana program tersebut akan diterapkan pada masa pandemi sebagai upaya meminimalisir bertambahnya kasus covid-19 di Jawa Timur. Program yang dibuat ialah Program Kampung Tangguh Semeru yang pembentukannya memang diprioritaskan pada kampung atau desa yang angka penyebaran covid-19 baik pasien positif, PDP (pasien dalam

pengawasan), dan ODP (orang dalam pemantauan) masih cukup tinggi. Dalam penerapan kampung tangguh di berbagai wilayah di Jawa Timur diharapkan dapat meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga lingkungan wilayahnya dan dapat berkolaborasi dengan baik dengan pemerintah daerah sehingga bisa mewujudkan tujuan untuk menekan angka covid-19 di wilayah Jawa Timur.

Berdasarkan hasil pengolahan data peran kampung tangguh di dalam masyarakat yang terkena wabah covid-19 ini sangat diperlukan adanya. Menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan ketua RT 04 dan ketua RW 14 Kelurahan Kalirungkut mengetahui bahwasannya kampung tangguh merupakan program dari pemerintah daerah yang dijadikan sebagai alternative dalam menekan angka covid-19 di Jawa Timur. Kampung tangguh semeru pertama kali diterapkan di RW 14 yang terbagi menjadi empat RT yakni RT 01, RT 02, RT 03, RT 04 mulai dilaksanakan pada awal mei 2020. Menurut ketua RT 04 dan ketua RW 14 kampung tangguh sendiri menjadi salah satu program yang dilaksanakan oleh seluruh kampung yang ada di Jawa Timur. Kampung tangguh dinyatakan tangguh sama dengan kuat yang menghancurkan masyarakat untuk selalu kuat ditengah serangan wabah virus covid-19 saat ini.

Adapun alasan mengapa kampung tangguh diterapkan di RT 04 RW 14 Kelurahan Kalirungkut Kota Surabaya yaitu karena adanya perintah wajib dari pemerintah selain adanya penerapan protokol Kesehatan juga harus menerapkan program kampung tangguh semeru. Menurut ketua RW 14 berpendapat bahwa kampung tangguh memberikan penguatan dan juga memeberikan semangat untuk dilakukan secara bersama-sama. Pada awal penerapan kampung tangguh di lingkungan RW 14 dengan segala pro dan kontra yang ada membuat masyarakat untuk mampu memahami bahwa kampung tangguh ada karena memiliki satu visi semua selain itu juga memiliki permasalahan yang sama yakni terdampaknya virus covid-19. Walaupun setiap daerah memiliki perbedaan karakter

wilayah. Akan tetapi dengan adanya penguatan akan menimbulkan kesadaran bagi masyarakat. Keberadaan kampung tangguh di tengah masa pandemi ini akan memberikan penguatan sehingga rasa takut yang dirasakan masyarakat sedikit demi sedikit akan hilang dalam artian hilang secara positif. Dengan menanamkan kesadaran kepada masyarakat untuk memebiasakan diri untuk hidup lebih sehat antara lain : sering mencuci tangan, dan menerapkan protokol Kesehatan yang telah dianjurkan pemerintah agar sebisa mungkin tidak dilanggar. Sedangkan menurut ketua RT 04 berpendapat bahwa kampung tangguh diharapkan dapat menjadi suatu program yang peduli kampung sehat termasuk menjamin seluruh warga masyarakatnya sehat. Walaupun pada awal penerapan kampung tangguh dan usaha untuk memperkenalkan kepada masyarakat pro dan kontra selalu ada akan tetapi Tindakan tegas juga perlu dilakukan. Mulai dari saling mengingatkan antar masyarakat bahkan apabila ada masyarakat yang melanggar pun respon yang diterima pun cepat sebab ada bantuan dari Babinsa, Linmas, dan pihak-pihak yang mendukung penertiban selama kampung tangguh diterapkan. Dengan adanya hal tersebut maka masyarakat lama kelamaan akan menyadari bahwa kampung tangguh merupakan alternative yang efektif. Sehingga semua warga dapat menerima, kondusif, bahkan semakin peduli dengan lingkungan sekitar. Jadi pada intinya kebijakan akan terlaksana dengan baik apabila pemerintah bisa melaksanakan kolaborasi yang baik dengan berbagai pihak yang akan dilibatkan dalam kebijakan atau program-program yang akan dilaksanakan.

Peran Swasta

Menurut (Nasution, 2018). sistem penyelenggaraan pemerintahan atau good governance dalam pelaksanaannya menyangkut aspek kelembagaan (organization) , ketatlaksanaan (business process) , dan sumber daya manusia (civil servant). Dari penjelasan tersebut maka dalam pelaksanaa *good governance* sangat dbutuhkan peranan *stakeholders* yang terdiri dari pemerintah, swasta, dan

masyarakat. salah satunya ialah peran swasta sebagai Lembaga yang juga turut serta memberikan bentuk penagabdian kepada masyarakat. Berdasarkan hasil pengolahan data peran swasta dengan adanya kampung tangguh sebagai upaya menekan angka covid-19 di RT 04 RW 14 Kelurahan Kalirungkut Kota Surabaya melakukan berbagai bentuk Gerakan peduli covid-19 dengan cara melakukan berbagai program-program bantuan yang diberikan kepada masyarakat terdampak covid-19 terutama di wilayah RT 04 RW 14 Kelurahan Kalirungkut Kota Surabaya. Salah satu instansi swasta yang melakukan bantuan sosial kepada masyarakat adalah PT iForte Solusi Infotek yang merupakan anak usaha PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR) yang turut aktif membantu masyarakat dalam mengatasi dampak pandemi covid-19. PT iForte Solusi Infotek melakukan bantuan sosial melalui beberapa program seperti Program CSR iForte Sehati. PT iForte Solusi Infotek menyalurkan bantuan kepada masyarakat dengan menggandeng Posko covid-19 yang dikelola oleh Pemkot Surabaya. Setiap paket sembako yang didonasikan iForte Sehati terdiri dari 5 Kg beras, 1 liter minyak goreng, 2 kaleng sarden, 2 kaleng kornet, dan 1 box teh celup yang dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan terutama masyarakat yang terdampak secara ekonomi khususnya mereka yang kehilangan penghasilan akibat pandemi ini. Selain PT iForte Solusi Infotek pihak swasta lain bahkan orang pribadi pun melakukan berbagai bentuk sumbangan atau bantuan sosial kepada warga terdampak covid-19 di RT 04 RW 14 Kelurahan Kalirungkut Kota Surabaya. Peran pihak swasta atau industri sekitar wilayah RT 04 RW 14 Kelurahan Kalirungkut Kota Surabaya memberikan bantuan sosial berupa sembako dan uang sedangkan orang pribadi biasanya berupa nasi bungkus yang akan diberikan kepada masyarakat yang terdampak covid-19 terutama keluarga pasien yang positif covid-19 di wilayah RT 04 RW 14 Kelurahan Kalirungkut Kota Surabaya.

Peran Masyarakat

Menurut Samah & Aref (2009, p.45) yang dikutip dari (Hermawan & Suryono, 2016) menyatakan bahwa partisipasi merupakan proses pembangunan sosial, dimana orang sebagai subjek dalam lingkungan mereka sendiri, mencari cara untuk memenuhi kebutuhan kolektif mereka dan harapan untuk mengatasi masalah umum yang mereka hadapi. Jadi partisipasi atau peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan sosial atau dalam implementasi kebijakan atau program-program yang dibuat oleh pemerintah. Berdasarkan hasil pengolahan data peran masyarakat dengan adanya kampung tangguh sebagai upaya menekan angka covid-19 di RT 04 RW 14 Kelurahan Kalirungkut Kota Surabaya melakukan berbagai bentuk pencegahan yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan warga sekitar yang berjumlah 20 warga. Semua warga menyatakan bahwa mereka saling bersama-sama memberikan semangat satu sama lain antar warga dengan adanya wabah covid-19. Dengan adanya kampung tangguh dirasa cukup membawa dampak positif sebab program kampung tangguh adalah program yang disusun dan dijalankan secara sistematis dan serentak. Sehingga output adanya kampung tangguh dapat menekan angka covid-19 di Jawa Timur terkhusus di wilayah RT 04 RW 14 Kelurahan Kalirungkut Kota Surabaya. Selama masa pandemi berlangsung warga secara kompak memberikan kekuatan satu dengan yang lainnya. Mereka berprinsip bahwa dalam satu lingkup lingkungan sama saja satu lingkup keluarga maka apabila mereka menyayangi keluarga mereka maka mereka akan menyayangi para tetangga pula. Sejauh ini warga masyarakat sangat berperan di dalam penanganan pencegahan covid-19 terutama bagaimana menekan angka covid-19 di RT 04 RW 19 Kelurahan Kalirungkut Kota Surabaya. Pedoman para warga sekitar sangat signifikan terutama dalam pola hidup antara sebelum dan sesudah covid-19. Menerapkan protokol Kesehatan dari pemerintah adalah salah satu Langkah sederhana yang dapat dilakukan warga sekitar sebagai bentuk mendisiplinkan diri dari ancaman virus

covid-19. Berikut adalah peran-peran masyarakat di RT 04 RW 14 Kelurahan Kalirungkut Kota Surabaya yang dilakukan sebagai upaya menekan angka covid-19 di lingkungan sekitar.

1. Wajib memakai masker saat keluar rumah : salah satu Langkah utama yang dilakukan oleh warga sekitar adalah mewajibkandiri untuk memakai masker saat berpergian atau keluar rumah. Dan hal tersebut telah menjadi kebiasaan wajib yang harus dilakukan. Sebab memakai masker dapat memperlambat penyebaran virus covid-19. Di dalam protokol Kesehatan pun telah dijelaskan bahwa memakai masker wajib selama masa pandemi.

2. Menjaga jarak : konsep jaga jarak penting dilakukan sebab semua orang tidak tahu siap saja yang membawa virus ataupun telah terjangkit virus. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan konsep jaga jarak bagi semua warga kampung saat hendak melakukan kegiatan-kegiatan kampung ataupun melakukan komunikasi antar warga.

3. Mencuci tangan : salah satu bentuk menekan angka covid-19 adalah dengan menerapkan wajib cuci tangan sebab cuci tangan merupakan salah satu pola hidup sehat. Di RT 04 RW 14 Kelurahan Kalirungkut Kota Surabaya seluruh warga per tiap rumah diwajibkan memiliki tempat cuci tangan, dengan tujuan setelah berpergian atau keluar rumah sebelum memasuki rumah diwajibkan cuci tangan agar masuk rumah dalam keadaan bersih.

4. Melakukan penyemprotan disinfektan : peran masyarakat dalam memerangi virus covid-19 ini adalah dengan rutin melakukan penyemprotan disinfektan secara keseluruhan mulai dari tiap rumah warga hingga jalanan kampung. Di RT 04 RW 14 Kelurahan Kalirungkut Kota Surabaya penyemprotan disinfektan dilakukan rutin selama 2 hari sekali dengan tujuan menghambat berkembangnya virus covid-19.

5. Melakukan Gerakan peduli tetangga : salah satu peran yang sangat baik dilakukan oleh seluruh warga masyarakat RT 04 RW 14 Kelurahan Kalirungkut Kota Surabaya adalah dengan melakukan Gerakan peduli tetangga di saat masa pandemi berlangsung. Hal ini

bertujuan untuk memberikan dukungan kepada keluarga warga masyarakat yang terdampak virus covid-19 dengan melakukan iuran warga dan hasil iuran akan diberikan kepada keluarga yang terdampak virus covid-19. Sehingga diharapkan peran masyarakat menjadi salah satu urgensi dalam mewujudkan tujuan dari adanya kampung tangguh yakni sebagai upaya untuk menekan angka covid-19 di RT 04 RW 14 Kelurahan Kalirungkut Kota Surabaya. Maka dengan adanya peran tersebut masyarakat akan lebih peduli dengan keadaan lingkungan sekitar di tengah wabah virus covid-19. Bersama-sama menyelesaikan masalah yang ada dan saling memberikan dukungan satu dengan yang lainnya.

Berdasarkan penjelasan diatas peran serta para stakeholders yang ada sangat menjadi penentu awal dalam mewujudkan keadaan ekonomi masyarakat ke arah yang lebih baik di tengah masa pandemi covid-19 ini. Dampak yang ditimbulkan pun tidak sedikit yang merugikan masyarakat antara lain PHK yang dialami para sebagian besar pekerja yang ada di Indonesia yang membuat keadaan ekonomi masyarakat mengalami kelesuan atau keterpurukan. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pembangunan sumber daya yang merupakan salah satu alternative dalam melakukan pengembangan ekonomi. Menurut (Wardana, 2016) Pembangunan manusia menjadi penting karena apabila suatu daerah tidak memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang potensial maka dapat menggunakan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk membangun dan memajukan daerahnya. Jadi, sumber daya manusia sangat berperan penting dalam pembangunan suatu daerah. Indeks pembangunan manusia (IPM) bermanfaat untuk membandingkan kinerja pembangunan manusia baik antarnegara maupun antar daerah. Oleh karena itu masyarakat merupakan peran utama dalam mewujudkan pengembangan ekonomi di tengah masa pandemi covid-19 ini melalui kebijakan atau program-program pemerintah dalam mengatasi keadaan ekonomi masyarakat agar lebih

baik melalui program kampung tangguh. Sebab hal tersebut sejalan dengan pendapat (Mubyarto, 2004) yang dikutip (Wardana, 2016) Modal manusia (human capital) merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan ekonomi. Dengan modal manusia yang berkualitas, kinerja ekonomi diyakini juga akan lebih baik. Sehingga dapat dikatakan bahwa "social development is economic development".

5. PENUTUP

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa di tengah wabah pandemi ini maka peran kampung tangguh yang merupakan program Gubernur Jawa Timur yang bekerjasama dengan Forkopimda Jawa Timur dan Jajarannya. Kampung Tangguh ini merupakan suatu project kolaboratif yang diadakan dengan tujuan untuk menciptakan kampung-kampung tangguh di lingkungan masyarakat terutama lingkungan masyarakat yang terkena dampak dari adanya virus covid-19. Maka agar kampung tangguh dapat dilaksanakan secara maksimal perlu adanya penerapan konsep *good governance* yang melibatkan kolaborasi dari ketiga pilar *good governance (stakeholders)* yakni Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat. Yang mana dari ketiga peran pilar tersebut dapat dilakukan secara maksimal agar tujuan dari kampung tangguh sendiri dapat diwujudkan yakni sebagai upaya menekan angka covid-19 di RT 04 RW 14 Kelurahan Kalirungkut Kota Surabaya. Berbagai bentuk peran mulai dari pemberian bantuan, dukungan, hingga pengetahuan dapat dijadikan sebagai bentuk peduli kepada masyarakat yang terdampak virus covid-19 di masa pandemi ini. Serta peran ketiga pilar *good governance* yang dilaksanakan secara maksimal dapat berpengaruh pada pengembangan ekonomi masyarakat. walaupun ditengah pandemi covid-19 keadaan ekonomi masyarakat tetap harus diutamakan terutama keadaan ekonomi masyarakat yang terdampak covid-19 agar kondisi ekonominya tetap stabil yang diwujudkan melalui pembangunan ekonomi melalui kebijakan atau program-program yang dibuat oleh pemerintah.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Buchloz, A. &. (1978). A Reason for Differences on Corporate Social Reporting. *Critical Perspectives on Accounting*, 10, 521–547.
- Cahyadi, A. (2017). PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK (Studi Tentang Kualitas Pelayanan Elektronik Kartu Tanda Penduduk Berbasis Good Governance Di Kecamatan Sukolilo Surabaya). *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 3(2).
<https://doi.org/10.30996/jpap.v3i2.1255>
- Calnen, G. (2010). Good governance. *Breastfeeding Medicine*, 5(6), 323–324.
<https://doi.org/10.1089/bfm.2010.9977>
- Dyah Putri Makhmudi, M. M. (2018). Prasarana Lingkungan Pada Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (Plpbk) Di Kelurahan Tambakrejo , Kota Semarang. *Jurnal Pengembangan Kota*, 6(2), 108–117.
<https://doi.org/10.14710/jpk.6.2.108>
- Hakim, A. (2016). Dinamika Pelaksanaan Good Governance Di Indonesia (Dalam Perspektif Yuridis Dan Implementasi). *Civil Service*, 10(1), 15–34.
- Hanafi, Y. S., & Tunggadewi, U. T. (2019). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam. 9, 153–160.
- Hermawan, Y., & Suryono, Y. (2016). Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan program-program pusat kegiatan belajar masyarakat Ngudi Kapinteran. *Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(1), 97.
<https://doi.org/10.21831/jppm.v3i1.8111>
- <http://infocovid19.jatimprov.go.id>. (2020). Info Covid Jatim.
<https://surabay.tribunnews.com/amp/2020/07/15/update-virus-corona-di-surabaya-hari-ini-rabu-15-juli-kasus-covid-19-tambah-76-sem-buh-125?page=2>. (2020). Update Virus Corona.
- Huraerah, Abu. (2008). *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Bandung: Humaniora.
- Ilham Arisaputra, M. (2013). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria Di Indonesia. *Yuridika*, 28(2), 188–216.
<https://doi.org/10.20473/ydk.v28i2.1881>
- Indarto, K. (2019). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN KAMPUNG WISATA “WARNA-WARNI” JODIPAN KOTA MALANG JAWA TIMUR. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 covid-19.*
- Kuswana, D. (2011). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Muis, M. A. H. (2016). Analisis Implementasi Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Panakukkang Kota Makassar. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(2), 73–82. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/102131-ID-analisis-implementasi-good-governance-da.pdf>
- Munaf, Y., Febrian, R. A., & S, R. S. (2018). KOTA PEKANBARU (Studi Kasus Pada Pelayanan Pertanahan). IV(2).
- Mustanir, A., & Abadi, P. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Di Kelurahan Kanyuara Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Politik Profetik*, 5(2), 247–261. Retrieved from <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/vi>

- ewFile/4347/3986%0Ahttp://journal.uin-
alauddin.ac.id/index.php/jpp/issue/view/636
- Namlis, A. (2015). Reformasi Birokrasi Suatu Usaha Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. *Humanus*, 14(1), 49.
<https://doi.org/10.24036/jh.v14i1.5401>
- Nasution, S. R. (2018). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Camat Sail Kota Pekanbaru. *Jurnal Niara*, 10(2), 72–77.
<https://doi.org/10.31849/nia.v10i2.1904>
- Nata, I., Manossoh, H., & Mawikere, L. M. (2018). Analisis Atas Penerapan Prinsip Good Governance Terhadap Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Pada Dinas Perumahan Kawasanpermukiman Dan Pertanahan Kabupaten Halmahera Utara. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04), 157–164.
<https://doi.org/10.32400/gc.13.03.20049.2018>
- Nugroho, D, Riant. (2013). *Kebijakan Publik ; Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Kumtindo.
- Putra, G. N. A., & Sutrisna, I. K. (2017). *PENGARUH PRODUKSI DAN INFLASI TERHADAP EKSPOR DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA*. 6(11), 2165–2194.
- Rustan, A., Wismono, F. H., Ramdhani, L. E., & Aziza, T. N. (2014). Reformasi Birokrasi ala Pemerintah Kota Pontianak. *Jurnal Borneo Administrator*, 10(2), 167–191.
- Sedarmayanti. (2012). *Good Governance "Kepemerintahan Yang Baik*. Bagian Kedua Edisi Revisi. Bandung: CV Mandar Maju.
- Uar, A. (2016). Pengaruh Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Kinerja Pelayanan Publik Pada Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kota Ambon. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 1.
<https://doi.org/10.26618/ojip.v6i1.31>
- Wardana, D. P. (2016). Pengaruh Pembangunan Ekonomi Terhadap Pembangunan Manusia Di Kalimantan Timur. *INOVASI : Jurnal Ekonomi Keuangan, Dan Manajemen*, 12, 179–191. Retrieved from <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI/article/view/804>
- Weya, O., T.Naukoko, A., & Kawung, G. M. (2015). *Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendapatan Analisis Economic Growth and Locally-Generated Revenue and*. 15(05), 59–65.
- Widya Wicaksono, Kristian. (2006). *Administrasi dan Birokrasi*. Yogyakarta: Graha Binu.